

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Yasmine Naurah Izari
NPP. 31.0667

*Asal Pendaftaran Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

E-mail: yasminenaurahizari@gmail.com
Dosen Pembimbing: Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

ABSTRACT

Background: Poverty is a situation where people cannot fulfill their needs, both basic needs and other needs. One of the government's efforts in dealing with the problem of poverty is by implementing the PKH policy. PKH is a program for providing conditional social assistance to families and/or individuals who are poor and vulnerable who are registered in the Integrated Data of the Poor Handling Program, processed by the Social Welfare Data and Information Center and designated as PKH beneficiary families. With the implementation of the PKH Policy in Kutai Kartanegara Regency, it is hoped that it can support poverty reduction by reducing poverty and social inequality and improving the standard of living of KPM through access to education, health and social welfare services. **Objective:** This research aims to analyze the Implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy, along with inhibiting factors, supporting factors, and efforts in implementing this Policy in supporting Poverty Alleviation in Kutai Kartanegara Regency. **Method:** The research method uses a descriptive qualitative method with data sources in the form of interview results, as well as supporting documents and proven by documentation. **Results:** The results of the research show that the Implementation of PKH Policy in Supporting Poverty Reduction in Kutai Kartanegara Regency has been running in accordance with the objectives of supporting poverty reduction by reducing poverty and social inequality, and helping the poor who are registered as KPM to be able to meet their needs in the fields of health, education, and social welfare. **Conclusion:** The implementation of the PKH policy in Kutai Kartanegara Regency is going well and supports poverty reduction, with six dimensions showing the success of implementing this policy, including human resource capabilities, communication between organizations, and social, economic and political environmental support. Obstacles faced include data discrepancies and differences in criteria for aid recipients, which are overcome through routine checking and validation as well as collaboration with PKH social assistants.

Keywords: Poverty, PKH Policy Implementation, Poverty Reduction

ABSTRAK

Latar Belakang: Kemiskinan adalah keadaan di mana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan yakni dengan menerapkan kebijakan PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan

rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dengan implementasi Kebijakan PKH tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat mendukung penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial serta meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), beserta faktor penghambat, faktor pendukung, dan upaya dalam implementasi Kebijakan tersebut dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. **Metode:** Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa hasil wawancara, serta dokumen pendukung dan dibuktikan dengan dokumentasi. **Hasil:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan PKH dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu mendukung penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta membantu masyarakat miskin yang terdaftar sebagai KPM untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan baik dan mendukung penanggulangan kemiskinan, dengan enam dimensi menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan ini, termasuk kapabilitas sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi, dan dukungan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Hambatan yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian data dan perbedaan kriteria penerima bantuan, yang diatasi melalui pengecekan dan validasi rutin serta kerjasama dengan pendamping sosial PKH.

Kata Kunci: Kemiskinan, Implementasi Kebijakan PKH, Penanggulangan Kemiskinan

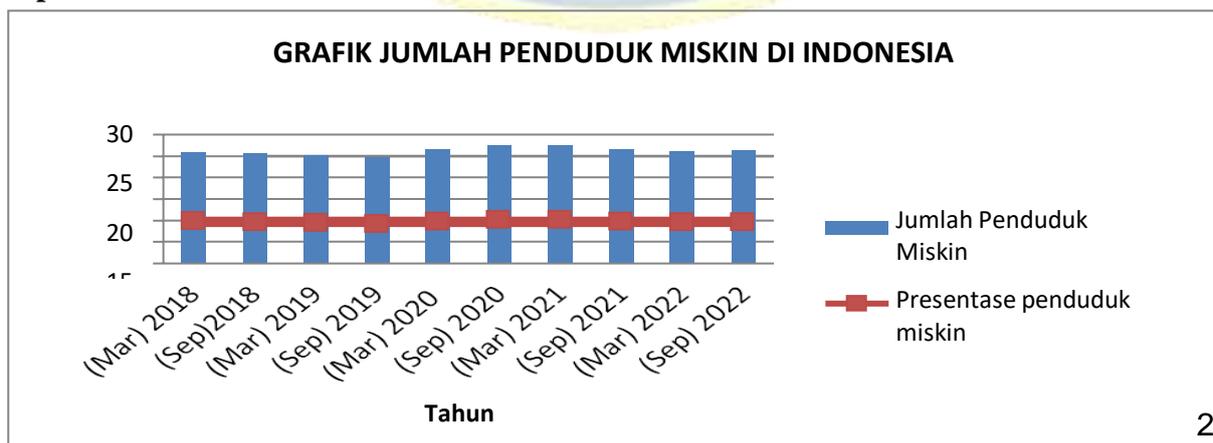
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan di mana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Namun, sampai saat ini kemiskinan masih menjadi masalah penting sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.1.

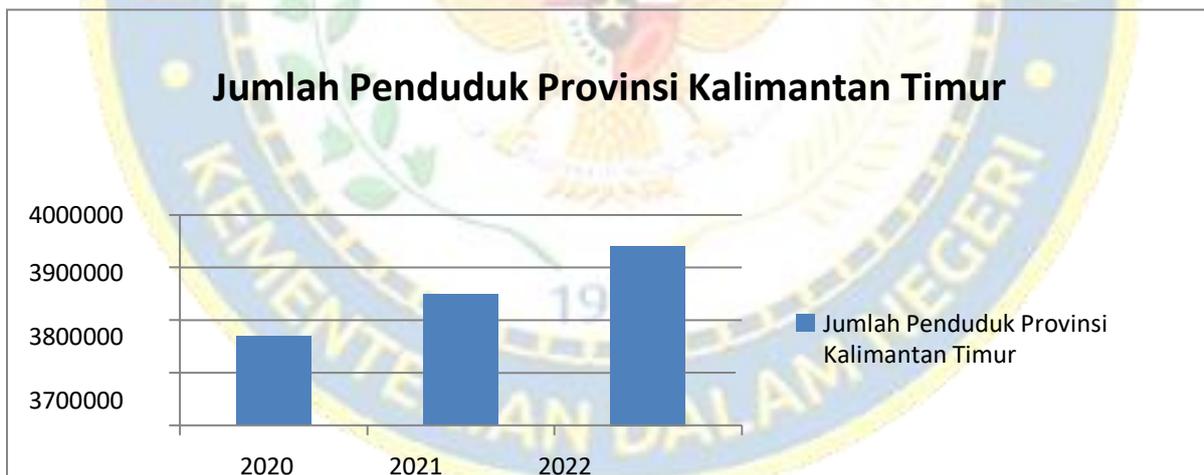
Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia pada rentang Bulan Maret 2018 hingga September 2023



Sumber: BPS, 2023 (Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023)

Dilihat dari Gambar 1.1, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum pandemi covid-19. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 25.950.000 orang, dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,82%. Pada September 2018, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 25.670.000 orang dengan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 9,66%, dan pada tahun 2019 terjadi penurunan pada jumlah dan presentase penduduk miskin, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 25.140.000 orang atau 9,41% pada Maret 2019, dan pada September 2019, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 24.790.000 orang atau 9,22%. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin di Indonesia, di mana pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 26.420.000 orang, dengan persentase 9,78%, dan pada September 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 27.550.000 orang dengan persentase 10,19%. Selanjutnya, pada Maret 2021 persentase jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,05% menjadi 10,14% atau 27.540.000 orang, dan pada September 2021 jumlah penduduk miskin kembali berkurang menjadi 26.500.000 orang, dengan persentase yang menurun secara signifikan sebesar 0,43% menjadi 9,71%. Kemudian, pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 26.160.000 orang dengan persentase 9,54%, dan terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2022 menjadi 26.360.000 orang, dengan persentase sebesar 9,57%.

Gambar 1.2.
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2022.

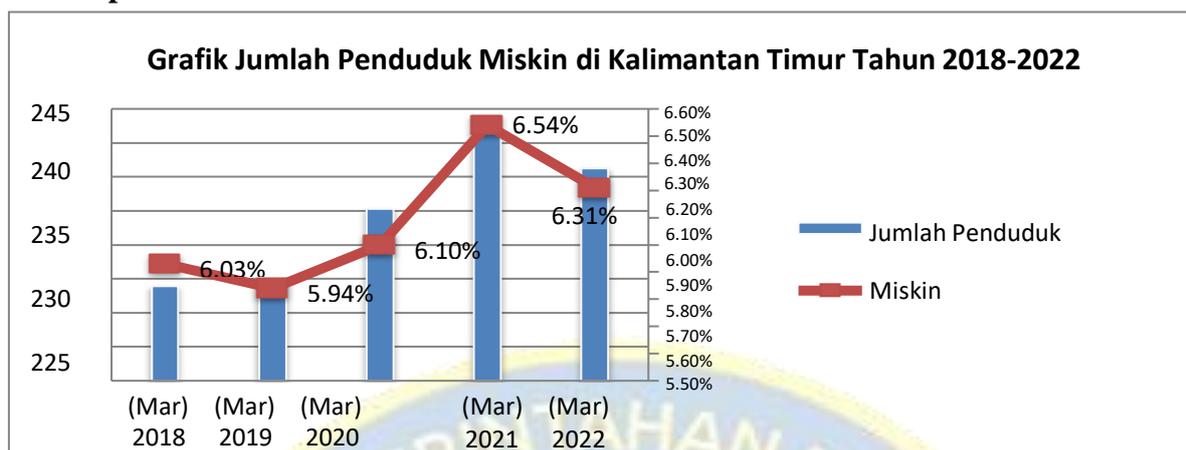


Sumber : BPS Kaltim (2023)

Dilihat dari Gambar 1.2, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3.769.073 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.849.832 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan, pada tahun 2022 jumlah penduduk kembali meningkat menjadi sebanyak 3.941.766 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya berpengaruh pada tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 1.3.

Grafik penduduk miskin di Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS (2023)

Berdasarkan Gambar 1.3, data dari Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 218.900 orang atau 6,03%. Kemudian pada Maret 2019 turun menjadi 219.092 orang atau 5,94%. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 menjadi 230.260 orang atau 6,10%, dan pada Maret 2021 menjadi 241.770 orang atau 6,54%. Lalu, pada Maret 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 236.250 orang atau 6,31%.

Gambar 1.4. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022



Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka 2022, BPS(2019)

Dilihat dari Gambar 1.4, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebesar 56.573 ribu jiwa, dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 56.560 ribu jiwa, dan juga kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 56.336 ribu jiwa. Akan tetapi, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dengan penambahan sebesar 2.084 ribu jiwa, menjadi 58.420 ribu jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan menjadi 62.360 ribu jiwa dan pada tahun 2022 menyentuh angka 62.870 ribu jiwa. Sehingga, dapat ditarik

kesimpulan bahwa selama periode tahun 2017-2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 6.297 ribu jiwa. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Beberapa kebijakan dan program telah dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia. Salah satu program yang diinisiasi oleh TNP2K adalah program penanggulangan kemiskinan, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan.

Pertama, kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan ini berupa program-program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin, yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan juga air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini meliputi BPJS Kesehatan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini berupa program yang ditujukan untuk kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Dengan pelaksanaan program menggunakan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan pembangunan secara berkelanjutan. Ketiga, kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha dalam skala mikro, memperkuat serta meningkatkan kemandirian usaha dan manajemen usaha dengan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan ketiga kelompok kebijakan tersebut, Peneliti tertarik untuk memperdalam PKH yang termasuk dalam kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. PKH merupakan program unggulan Kementerian Sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dalam pengentasan kemiskinan Program ini merupakan Program Pemberian Bantuan Non Tunai (PBNT) bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agar dapat digunakan untuk memeriksakan kesehatan dan menyekolahkan anaknya. Walaupun program ini menggunakan nomenklatur KPM namun unit penerima bantuan penerima adalah per orang.

PKH dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam jangka pendek, PKH ditargetkan memberikan pemasukan kepada KPM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan, target jangka panjang ialah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kapasitas pendidikan anak di masa depan. Dengan adanya program ini, diharapkan para Keluarga Penerima Manfaat memiliki akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial dasar berupa kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam program ini, terdapat 3 (tiga) komponen penerima bantuan dengan klasifikasi tertentu, yaitu komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Komponen pendidikan meliputi jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Komponen kesehatan mencakup anak usia dini dan ibu hamil, serta komponen kesejahteraan sosial meliputi penyandang disabilitas. Pada komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, terdapat beberapa klasifikasi yang masuk dalam komponen kesejahteraan sosial diantaranya ialah penyandang disabilitas dan lansia. Sedangkan, untuk kewajiban dalam komponen kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang anak balita dan prasekolah, serta kewajiban dalam bidang pendidikan ialah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga ke

satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah. Untuk anggota keluarga penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitas anggota keluarga tersebut.

Tabel 1.1.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022

2017	2018	2019	2020	2021	2022
45	104	13.088	13.621	14.635	16.390

Sumber: Data capaian PKH Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara, 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terjadi lonjakan yang signifikan dari jumlah KPM yang awalnya berjumlah 45 KPM pada tahun 2017, kemudian bertambah 59 KPM menjadi 104 KPM di tahun 2018. Jumlah mengalami peningkatan sangat signifikan pada tahun 2019, dengan bertambahnya 12.984 KPM. Pada tahun 2020, jumlah KPM kembali mengalami peningkatan dengan bertambahnya 533 keluarga menjadi 13.621 KPM. Pada tahun 2021 bertambah lagi menjadi 14.657 dan tahun 2022, jumlah KPM di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16.390 keluarga. Untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk miskin, jumlah KPM-PKH, serta Jumlah Penduduk Miskin Bukan Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Kutai Kartanegara, Penulis sajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah KPM-PKH, serta Jumlah Penduduk Miskin Bukan Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah KPM-PKH (orang)	%	Jumlah Penduduk Miskin Bukan Penerima Manfaat PKH (orang)	%
2017	56.573	45	0,08%	56.498	99,87%
2018	56.560	104	0,18%	56.456	99,82%
2019	56.336	13.088	23%	56.232	77%
2020	58.420	13.621	23,3%	44.023	76,7%
2021	62.360	14.635	23,4%	47.703	76,6%
2022	62.870	16.390	26%	46.480	74%

Sumber : Diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terlihat bahwa dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2017 hingga 2019, dukungan Program PKH relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari jumlah penduduk miskin sebanyak 56.573 orang pada tahun 2017, Program PKH hanya memberikan kontribusi sebesar 0,08% atau sebanyak 45 KPM- PKH, tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin 56.560, Program PKH berkontribusi sebesar 0,18% atau sebanyak 104 KPM-PKH. Sedangkan, mulai tahun 2019, kontribusi Program PKH menunjukkan kenaikan signifikan dengan jumlah KPM-PKH sebanyak 13.088 atau 23%. Pada tahun 2020 dari jumlah penduduk miskin sebanyak 58.420, Program PKH memberi kontribusi sebesar 23,3% atau sebanyak 13.621 KPM-PKH. Kemudian, pada tahun 2021, KPM-PKH mengalami sedikit kenaikan menjadi 23,4%, dengan jumlah yang meningkat menjadi sebanyak 14.635 orang dari 62.360 penduduk miskin. Selanjutnya pada tahun 2022, jumlah KPM-PKH kembali meningkat menjadi 26% atau 16.390 orang dari 62.870 orang penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari uraian tersebut diatas dan berdasarkan data pada Tabel 1.2, perbandingan antara jumlah KPM-PKH dan Jumlah Penduduk Miskin Bukan Penerima Manfaat PKH terlihat cukup signifikan. Pada tahun 2017 Jumlah Penduduk Miskin Bukan Penerima Manfaat PKH sebanyak 56.498 orang atau 99,87%, tahun 2018 turun menjadi 56.456 orang atau 99,82%. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah Penduduk Miskin Bukan Penerima Manfaat PKH menjadi 56.232 orang atau 77%. Kemudian, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 44.023 orang atau 76,7%. Jumlah ini kembali mengalami penurunan sebesar 0,1% pada tahun 2021 menjadi 76,6% atau sebesar 47.703 orang, dan pada tahun 2022 Jumlah Penduduk Miskin Bukan Penerima Manfaat PKH sebesar 74% atau 46.480 orang.

Di sisi lain, berdasarkan informasi awal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, menemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah KPM-PKH. Ketidaksesuaian data terjadi karena adanya perubahan pada mekanisme pendataan. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara mendata pada tahun 2022 terdapat 21.000 orang yang seharusnya menerima bantuan yang digulirkan pemerintah pusat, akan tetapi realisasinya hanya 16.390 orang yang menerima bantuan PKH. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data penerima PKH, mekanisme kegiatan ini sesuai dengan perubahan mekanisme pendataan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTKS. Perubahan dalam mekanisme pendataan terletak pada hilangnya kolom profesi, sehingga dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi pendataan harus dilakukan dengan teliti agar bantuan PKH dapat diberikan kepada orang yang tepat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kekeliruan serta memastikan keabsahan data, sehingga pada penyaluran bantuan PKH selanjutnya dapat tersalurkan dengan merata pada seluruh KPM-PKH.

Mengingat relatif banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara dan belum optimalnya dukungan Program PKH, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada Program PKH, namun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan tersebut berupa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti kebijakan Kukar Idaman dan program bantuan pangan. Kebijakan Kukar Idaman adalah kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 23 jenis program. Penerapan kebijakan ini ditujukan untuk menyalurkan bantuan bagi penduduk miskin bukan penerima manfaat PKH.

Untuk itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara”.

1.2. Kesenjangan Masalah

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, masalah ini tetap signifikan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dari BPS menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin secara signifikan sejak pandemi Covid-19. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat, kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan masih relatif kecil dibandingkan jumlah total penduduk miskin. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian data penerima PKH akibat perubahan mekanisme pendataan, yang mengakibatkan 21.000 orang seharusnya menerima bantuan, namun realisasinya hanya 16.390 orang. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diimplementasikan dan realitas di lapangan, termasuk tingginya jumlah penduduk miskin, ketidaksesuaian data penerima manfaat, dan rendahnya cakupan Program PKH dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Hariyanti (2018) dengan judul “Dampak Kebijakan Pemerintah akan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Terjun Medan Marelan” bertujuan untuk mengetahui dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu, kesejahteraan masyarakat penerima bantuan PKH berjalan dengan baik. Tetapi, dari sisi ekonomi PKH belum mampu menekan angka kemiskinan. Penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pemberian Bantuan PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” yang dilakukan oleh Nurma Mustika Hasna (2019) memiliki bertujuan untuk menganalisa dampak dari pemberian bantuan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH memberikan dampak positif dan negatif, dampak positif nya ialah meningkatnya kualitas kesehatan. Sedangkan, dampak negatif nya ialah adanya peningkatan pada taraf pendidikan. Penelitian berjudul “Dampak Sosial PKH Terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo” yang dilakukan oleh Naufan Syauqi (2019) bertujuan untuk melihat dampak sosial dari PKH terhadap KPM di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, menggunakan metode penelitian survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada komponen PKH dalam memperhatikan beban pengeluaran dalam pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, Ainun Oktavia Sari (2020) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat PKH Exit Mandiri dalam Perspektif *The Most Significant Change Technique* (MSCT)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat dampak sosial ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat melalui perspektif *The Most Significant Technique*, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PKH telah memberikan perubahan baik positif, maupun negatif. Dampak positif nya ialah adanya perubahan dalam bidang ekonomi dan pendidikan dari Keluarga Penerima Manfaat. Sedangkan, dampak negatifnya ialah kurang patuhnya KPM saat menjadi peserta pada komitmen pendidikan. Di Aceh Barat, Muhariyanti Siregar (2021), melakukan penelitian dengan objek yang sama, yaitu PKH yang bertujuan untuk melihat dampak dari PKH terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian berjudul “Dampak PKH Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat” tersebut

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian menyatakan bahwa KPM mengalami perubahan dalam keluarganya, dana yang didapatkan dapat membantu memenuhi konsumsi kebutuhan keluarga.

Hasil penelitian oleh Katriza, Safira, dan Niken (2022) menyimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan maksimal. Faktor komunikasi, sumber daya dan struktur menjadi faktor penghambat dalam implementasi program tersebut, namun disposisi dari pendamping PKH menjadi faktor pendukung bagi implementasi program. Saran yang dapat diberikan terkait tiga hal. Pertama, memperjelas proses pendataan, khususnya saat validasi data, dan meningkatkan peran pendamping sosial dalam menentukan kriteria peserta PKH agar tepat sasaran. Kedua, penda melakukan dana sharing dalam bentuk pemberian insentif tambahan, penyediaan perangkat internet dan kendaraan dinas bagi operasional pendamping atau petugas lapangan. Ketiga, mempermudah pencetakan kartu KKS di unit kerja terdekat. Reza Darmiyanti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020” Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) elemen Program Implementasi Program Keluarga Harapan sudah baik dikarenakan beberapa aspek yaitu jelasnya tujuan dan adanya anggaran yang digunakan untuk pelaksana (b) Elemen Organisasi pelaksana sudah sangat efektif dalam pengimplementasian PKH dalam pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan UPPKH Meningkatkan kualitas pendampingan dari segi pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan pengembangan serta membangun inovasi-inovasi yang membantu perekonomian masyarakat untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir (c) elemen sasaran programnya yang jelas dengan data yang melewati DTKS dan diproses oleh Kementerian Sosial.

Hasil penelitian oleh Juhari dan Ela (2021) yang berjudul “Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya” menunjukkan bahwasanya masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan dari PKH, masyarakat juga memenuhi hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan PKH walaupun belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, dan bantuan untuk saat ini juga sudah tersalurkan dan diterima dengan baik oleh penerima bantuan, walaupun belum menyeluruh karna masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam mengupdate data. Perlu adanya data yang kongkrit dan update dalam penyaluran PKH kepada peserta sehingga tepat sasaran dan memanfaatkan sebaik mungkin bantuan yang diberikan sehingga menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Hasil penelitian oleh Rizayani, dkk. (2022) menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan berbagai sektor penting pada masyarakat kota Banjarbaru melalui PKH, seperti peningkatan bidang ekonomi, kesehatan, sosial hingga pendidikan. PKH merupakan diantara kebijakan bidang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru. Yang terakhir, Ayuni dan Alih (2022) memaparkan hasil dari penelitian jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) di Indonesia” ini yaitu jumlah penerima PKH masih sedikit baru 2,7% dari angka kemiskinan namun tingkat kepuasan masyarakat 93%. Disisi lain masih adanya penyalahgunaan wewenang sehingga 7% yang ada tersebut harus segera ditangani. Adanya fasilitas konsultasi publik yang dinamakan Contact Center yang dibuat oleh Kemensos. Sikap integritas pegawainya yang belum kuat mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Saran yang diberikan yaitu memberikan pelatihan ke KPM (Kartu Penerima Manfaat), perbaikan dalam merekrut SDM (Sumber Daya Manusia), dan pendamping PKH menjadi fasilitator tentang informasi pelatihan dan kursus sertifikasi kepada KPM.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), beserta faktor penghambat, faktor pendukung, dan upaya dalam implementasi Kebijakan tersebut dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memperbaharui pengetahuan tentang kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menunjukkan bahwa meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai upaya lainnya telah dilakukan, angka kemiskinan di wilayah tersebut tetap meningkat dari 56.573 orang pada 2017 menjadi 62.870 orang pada 2022. Temuan ini menambah dimensi baru dalam literatur yang ada, yang sebagian besar menunjukkan dampak positif PKH terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia (Hariyanti, 2018; Hasna, 2019; Syauqi, 2019; Sari, 2020; Siregar, 2021). Penelitian ini juga menyoroti masalah validasi dan ketepatan sasaran dalam penerapan PKH yang diidentifikasi sebagai penghambat dalam beberapa studi sebelumnya (Katriza et al., 2022; Darmiyanti, 2022; Juhari & Ela, 2021; Ayuni & Alih, 2022), serta pentingnya inovasi kebijakan lokal seperti program Kukar Idaman dan bantuan pangan untuk mengatasi ketidakefisienan PKH.

II. METODE

Pada kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti mengimplementasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan pemaparan yang dituliskan oleh Ibrahim (2015), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan kondisi objek yang sedang diteliti sejalan dengan keadaan ketika penelitian dilaksanakan. Peneliti ingin mengetahui upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan implementasi program keluarga harapan dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni teori Implementasi oleh Van Meter Van Horn (dalam Agustino, 2006), mengenai indikator kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat enam dimensi pada teori tersebut, yakni standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; Karakteristik Pelaksana; Komunikasi antar organisasi pelaksana; Disposisi atau sikap para pelaksana; dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. penulis memanfaatkan data primer sebagai hasil wawancara, catatan, serta pengambilan dokumentasi dengan pihak yang terkait yang berada di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, untuk data sekunder, penulis menggunakan data dari buku referensi, artikel, jurnal yang berkaitan, peraturan undang-undang serta berbagai macam sumber lain yang berhubungan dengan program keluarga harapan. Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pendamping Sosial PKH, dan Masyarakat Penerima Bantuan PKH. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Selanjutnya, data data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan

analisis data dari wawancara, observasi, dan kajian peraturan terkait. Penulis menggunakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai dasar kebijakan PKH yang mencakup tujuan, sasaran, kriteria, dan pelaksanaan. Data diolah dari penelitian langsung di lapangan, dengan hasil disajikan secara deskriptif dan dilengkapi dengan kutipan langsung dari narasumber. Analisis implementasi kebijakan ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam dimensi untuk menguraikan efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan PKH di daerah tersebut.

3.1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dimensi tujuan dan standar Indikator ini menilai sejauh mana tujuan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) telah tercapai, yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Tujuannya adalah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, serta meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH memberikan bantuan nontunai secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama satu tahun, mencakup ibu hamil/menyusui, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Hamly, bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi KPM. Keberhasilan PKH diukur dengan meningkatnya kesejahteraan KPM, terpenuhinya kebutuhan dasar, dan berkurangnya jumlah penduduk miskin, memastikan kehadiran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup Dinas Sosial, pihak kecamatan, dan pendamping PKH. Sumber daya manusia terdiri dari tenaga ahli, koordinator wilayah, koordinator Kabupaten/Kota, dan pendamping sosial, yang semuanya berperan penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program. Pendamping PKH, seperti Ibu Viko, berperan sebagai jembatan koordinasi antara KPM dan pihak kecamatan, melakukan verifikasi data, pemantauan, dan pelaporan kendala. Mekanisme pelaksanaan PKH sesuai dengan Permensos Nomor 10 Tahun 2017 meliputi perencanaan hingga pendampingan, dengan fasilitas yang memadai dari Dinas Sosial dan kecamatan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Wiwik. Monitoring rutin memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Karakteristik pelaksana kebijakan PKH meliputi kompetensi dan ukuran staf, serta upaya mereka dalam menangani tantangan dan mengevaluasi keberhasilan. Dalam pelaksanaan PKH, hambatan seperti hilangnya beberapa KPM dari daftar penerima bantuan terjadi akibat perubahan aplikasi PKH yang mengakibatkan perbedaan kriteria penerima. Misalnya, Ibu Muallimah kehilangan bantuan selama dua tahun karena kesalahan data pada aplikasi baru, namun masalah ini telah diatasi setelah validasi ulang. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, koordinator, dan pendamping PKH meningkatkan komunikasi dengan KPM untuk memastikan mereka tetap terdaftar dan menerima bantuan. Evaluasi keberhasilan PKH dilakukan dengan memantau jumlah KPM setiap tahun dan menilai penurunan jumlah masyarakat miskin serta KPM yang secara sukarela melepaskan diri dari bantuan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Viko.

Implementasi kebijakan PKH memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik antar organisasi pelaksana dan stakeholder untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Stakeholder dalam kebijakan PKH meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Himpunan Bank Negara (Himbara), serta media massa. Koordinasi yang baik membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi, seperti perubahan aplikasi yang menyebabkan beberapa KPM hilang dari daftar penerima bantuan, yang

disosialisasikan oleh pihak kecamatan bersama pendamping kepada KPM. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Riadi Hadiwinoto, menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan PKH.

Pelaksana kebijakan PKH, termasuk aparatur Dinas Sosial, Koordinator Wilayah, dan para pendamping, harus memahami kebijakan tersebut untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta pendamping PKH, pemahaman mereka dinilai baik dan koordinasi antar pelaksana telah terjalin dengan baik. Mereka memahami tugas dan wewenangnya serta mendukung kebijakan PKH karena dinilai membawa dampak positif. Ibu Viko, seorang pendamping PKH, menambahkan bahwa pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan loyalitas, ketaatan, dan tanggung jawab tinggi.

Kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, dan politik memainkan peran penting dalam keberhasilan kebijakan PKH. Kondisi ekonomi yang baik memungkinkan KPM mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan lebih mudah. Wawancara dengan penerima bantuan menunjukkan dampak positif dari PKH, seperti kemudahan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga tidak mampu dan disabilitas. Anggaran PKH yang meningkat setiap tahun juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Dukungan politik juga terlihat dari bantuan sepeda motor dan penghargaan kepada para pendamping PKH di Kutai Kartanegara. Kondisi eksternal ini mendukung pelaksanaan kebijakan PKH dan membantu meningkatkan kesejahteraan KPM.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Faktor pendukung implementasi kebijakan PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi komitmen dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, aturan yang jelas terkait pelaksanaan PKH, serta dukungan dari sumber daya yang profesional seperti Dinas Sosial dan pendamping PKH. Namun, terdapat faktor penghambat seperti kesalahan teknis pada aplikasi baru yang menyebabkan data KPM terhapus, serta perbedaan kriteria antara syarat penerima bantuan dan kondisi di lapangan, yang mengharuskan pendamping melakukan pengecekan dan validasi data secara rutin untuk memastikan KPM tetap terdaftar sebagai penerima manfaat.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis efektivitas dan tantangan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari sumber daya profesional, merupakan faktor pendukung utama. Namun, terdapat kendala seperti kesalahan teknis pada aplikasi baru yang menyebabkan data KPM terhapus dan perbedaan kriteria penerima bantuan di lapangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sonia Hariyanti (2018) dan Nurma Mustika Hasna (2019) yang juga menemukan bahwa PKH memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, namun masih ada tantangan dalam menekan angka kemiskinan. Naufan Syauqi (2019) dan Ainun Oktavia Sari (2020) menekankan dampak sosial PKH, sementara Muhariyanti Siregar (2021) dan Reza Darmiyanti (2022) mencatat pentingnya dukungan politik dan anggaran dalam implementasi PKH. Juhari dan Ela (2021) serta Rizayani, dkk. (2022) menunjukkan peningkatan kesejahteraan di berbagai sektor akibat PKH, meskipun masih ada masalah dalam validasi data dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Ayuni dan

Alih (2022) menyoroti perlunya pelatihan bagi KPM dan perbaikan dalam rekrutmen SDM untuk meningkatkan efektivitas program.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum sudah berjalan baik, dengan tujuan mendukung penanggulangan kemiskinan, membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, enam dimensi menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan ini: tujuan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018; kapabilitas sumber daya manusia dan fasilitas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017; kompetensi pelaksana kebijakan sudah memadai; komunikasi antar organisasi pelaksana sudah baik; sikap para pelaksana menunjukkan pemahaman dan tanggung jawab tinggi; serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung pelaksanaan kebijakan dengan kenaikan anggaran tiap tahun meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hambatan dalam implementasi termasuk ketidaksesuaian data pada aplikasi yang menyebabkan data KPM terhapus dan perbedaan antara kriteria syarat penerima bantuan dengan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi hambatan ini, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengecekan dan validasi data rutin serta kerjasama dengan pendamping sosial PKH dalam menetapkan kriteria masyarakat miskin sesuai kondisi di lapangan. **Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. **Arah Masa Depan Penelitian:** Peneliti menyadari belum banyak yang membahas objek penelitian serupa, sehingga ke depannya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan dengan metode yang lebih disempurnakan lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A, Ibrahim, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Agustino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*
- Anggraeny, Ayuni P.; Nugroho, Alih A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*. 4(2), 39-53.
- BPS: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret (2023)
- Darmiyanti, Reza. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*. 5(2). <https://doi.org/10.36341/jdp.v5i2.2776>

- Hariyati, Sonia. (2018). Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Terjun Medan Marelan
- Hasna, Nurma Mustika. (2019). Analisis Dampak Pemberian Bantuan PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- Imania, Katriza; Soraida, Safira; Seftiani Niken. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. *JIPAN*. 2(1), 1-18.
- Juhari; Yunita, Ela. (2021). Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. *Al Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*. 5(2). <http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v5i2.15328>
- Kutai Kartanegara dalam Angka (2022)
- Rizayani, Siti, dkk. (2022). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*. 2(1).
- Sari, Ainun Oktavia Sari. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri Dalam perspektif The Most Significant Change Technique (MSCT)
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta
- Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS (2023)
- Siregar, Muhariyanti. (2021). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat.
- Syauqi, Naufan. (2019). Dampak Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.